

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks yang merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara representatif dan terukur. Cara untuk menghitung IPM adalah indeks kesehatan dikali indeks pendidikan dikali indeks pengeluaran dikali seratus. IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh UNDP. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*). Proses pembangunan sumber daya manusia adalah suatu proses yang berjangka panjang yang membutuhkan interaksi dari semua sektor yang akan terjadi dengan bertahap (UNDP, 2004).

IPM menurut BPS merupakan ukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang

mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup yang layak. IPM mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

2.1.2.1 Tujuan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1995) tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal penting yang harus diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Empat hal pokok tersebut memuat pijakan-pijakan yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

a) Produktivitas

Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan berperan penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pembangunan ekonomi juga dapat digolongkan dalam bagian pembangunan manusia.

b) Pemerataan

Dalam hal mendapatkan kesempatan dan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial, penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam hal tersebut. Oleh karena itu kegiatan yang dapat meminimalisir kesempatan untuk mendapatkan akses tersebut harus diperhatikan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dan

kesempatan yang ada dan ikut berperan dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c) Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga disiapkan untuk generasi yang akan datang.

d) Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam hal keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan masyarakat ataupun menerima manfaat dari pembangunan yang ada.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah kondisi dimana seseorang telah memasuki usia kerja, ingin bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 2012). Cara untuk menghitung TPT yaitu jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Dalam perekonomian karena adanya pengangguran dapat menjadi masalah karena pengangguran dapat menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga timbul masalah lain, seperti kemiskinan, penurunan kesejahteraan dan masalah-masalah sosial lainnya.

2.1.2.1 Jenis-jenis Pengangguran

jenis pengangguran berdasarkan cirinya menurut Sukirno (2012) dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta akibat jumlah lowongan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan penambahan tenaga kerja.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terjadi terutama di sektor pertanian dan jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan faktor seperti besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. Seringkali didapati jumlah tenaga kerja yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan, kelebihan ini dikatakan sebagai pengangguran tersembunyi.

3) Pengangguran Bermusim

Yaitu pengangguran yang muncul akibat perubahan musim. Contohnya penyadap karet dan nelayan yang tidak bisa bekerja saat musim hujan atau petani yang tidak dapat mengerjakan pekerjaannya saat musim kemarau.

4) Setengah Menganggur

Kondisi migrasi dari desa ke kota biasanya sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menganggur sepenuh waktu. Adapula yang bekerja tapi dibawah jam kerja normal. Mungkin hanya bekerja satu atau dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Jenis pekerja ini dikategorikan sebagai setengah menganggur (*underemployed*).

2.1.2.2 Penyebab Pengangguran

Kaufman & Hotchkiss dalam (Pujoalwanto, 2024) mengidentifikasi penyebab pengangguran sebagai berikut:

1) Proses Mencari Kerja

Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses mencari kerja terdapat hambatan yang disebabkan keinginan pekerja untuk berpindah ke pekerjaan lain, serta tidak sempurnanya informasi tentang besarnya tingkat upah yang layak diterima.

2) Kekakuan Upah

Tingkat upah yang tidak fleksibel menyebabkan terjadinya pengangguran. Penurunan produksi turut menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja. Akibatnya, akan terjadi penurunan besar upah yang ditentukan. Dengan upah yang kaku, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami peningkatan, hal ini meningkatkan penawaran tenaga kerja sebagai dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah tersebut.

3) Efisiensi Upah

Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha pekerja untuk bekerja. Hal ini memberikan konsekuensi jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

2.1.4 Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat

yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (Tenreng & Idrus, 2022). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.

Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Namun, suatu keadaan dapat dikatakan inflasi apabila telah memenuhi tiga komponen, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus menerus (Rahardja & Manurung, 2008). Artinya, kenaikan harga suatu komoditas belum bisa dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum dikatakan inflasi jika terjadi hanya sesaat.

2.1.4.1 Penyebab Terjadinya Inflasi

Secara umum, penyebab terjadinya inflasi ada 2 jenis. *Demand pull inflation* dan *cost push inflation*. Kedua penyebab ini memiliki penyebab masing-masing yang berbeda:

2. Inflasi karena kelebihan permintaan efektif atas barang dan jasa (*demand pull inflation*).

Permintaan efektif yang besar dari masyarakat tanpa di imbangi dengan penyediaan barang dan jasa akan menyebabkan keseimbangan antara permintaan

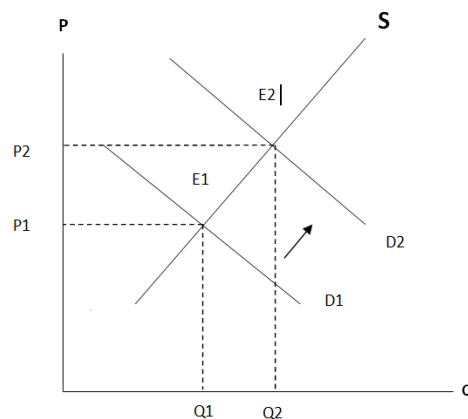
dengan penawaran terganggu, akibatnya harga barang naik (Setiawati, 2021).

Dengan demikian, inflasi akan terjadi.

Demand pull inflation dapat terjadi karena beberapa hal berikut:

- Terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat karena terlalu banyak uang yang dialirkan oleh bank sentral.
- Meningkatnya anggaran belanja negara dan ekspansi bisnis dapat meningkatkan permintaan barang secara keseluruhan, akhirnya memicu inflasi.
- Konsumen lebih memilih membeli barang dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan untuk menabung
- Besarnya pajak diturunkan.

Demikian merupakan kurva *demand pull inflation* yang telah di buat penulis sebagai berikut:

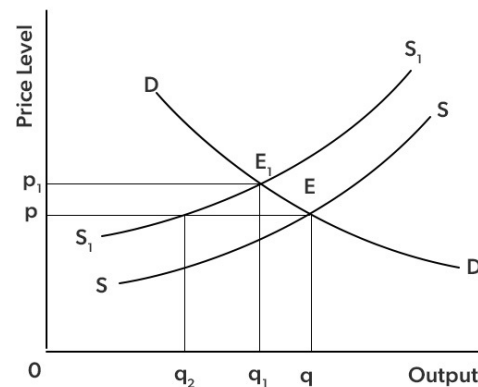


Gambar 2.1 Kurva Demand Pull Inflation

Keterangan: naiknya permintaan barang Q_1 ke Q_2 membuat harga barang juga naik dari P_1 ke P_2 . Naiknya harga ini mengakibatkan kurva D_1 bergeser ke D_2 yang berarti pula bergesernya keseimbangan dari E_1 ke E_2 , namun tidak diimbangi naiknya penawaran.

2. Inflasi karena naiknya biaya produksi (*Cost push inflation*)

Inflasi dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi perusahaan dengan harga pokok produksi naik dan menyebabkan hasil produksi dan perusahaan berkurang sehingga harga barang naik (Setiawati, 2021). Demikian merupakan kurva *demand cost push inflation* yang telah di buat peneliti sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kurva Cost Push Inflation

Keterangan: naiknya biaya produksi menyebabkan hasil produksi turun sehingga penawaran berkurang dari Q_1 ke Q_2 . Turunnya penawaran menyebabkan harga naik dari P_1 ke P_2 . Turunnya penawaran membuat kurva bergeser dari S_1 ke S_2 yang bergeser pula dari E_1 ke E_2 .

2.1.4.2 Penggolongan Inflasi

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10% — 30% setahun; berat antara 30% — 100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun

2.1.4.3 Dampak Inflasi

Pekerja dengan gaji tetap sangat dirugikan oleh inflasi. Inflasi mempunyai dampak positif dan negatif tergantung pada tingkat keparahannya. Jika inflasi dalam kondisi moderat, justru berdampak positif yaitu dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik, terutama melalui peningkatan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi (Tenreng & Idrus, 2022). Sebaliknya pada saat inflasi tinggi, yaitu ketika terjadi inflasi yang tidak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian tampak stagnan. Masyarakat menjadi kurang antusias dalam bekerja, menabung atau berinvestasi dan memproduksi karena kenaikan harga yang cepat.

Masyarakat yang berpendapatan tetap seperti PNS, pegawai swasta maupun pekerja juga tidak akan mampu menanggung harga-harga tersebut, sehingga kehidupan mereka akan semakin terpuruk seiring berjalannya waktu. Inflasi juga membuat masyarakat enggan menabung karena nilai uang menurun. Memang benar tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi lebih tinggi dari tingkat bunga maka nilai uang akan terus menurun. Jika masyarakat tidak mau menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena untuk mengembangkan dunia usaha diperlukan modal bank yang berasal dari tabungan masyarakat.

2.1.4.4 Penanganan Inflasi

Sebagaimana halnya yang umum terjadi pada negara-negara berkembang, inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat *monetary*

policies, sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari *cosh push inflation* lebih besar dari pada *demand pull inflation*.

Defisit APBN, peningkatan cadangan devisa, pembenahan sektor pertanian khususnya pada sub sektor pangan, dan pembenahan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi posisi penawaran agregat, merupakan hal-hal yang perlu mendapatkan penanganan yang serius untuk dapat menekan inflasi ke tingkat yang serendah mungkin di Indonesia, di samping tentunya pengelolaan tepat dan pembenahan di sektor moneter (Atmadja, 1999).

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi seluruh wilayah (Marginingsih & Sasana, 2009).

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

2.1.5.1 Cara Perhitungan PDRB

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang maupun jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Dalam penyajiannya unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 17 sektor atau lapangan usaha yang meliputi: Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

b. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan dari semua komponen permintaan akhir, yaitu:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik regional bruto

4) Perubahan stok

5) Ekspor netto

c. Menurut Pendekatan Pendapatan

Disebutkan bahwa PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah berupa upah atau gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya (BPS, 2015).

2.1.6 Upah Minimum Regional (UMR)

Upah minimum regional adalah standar terendah yang digunakan oleh para pelaku industri untuk memberikan upah/gaji terhadap para pegawai atau karyawan dalam perusahaannya. Pemerintah mengatur hal ini melalui peraturan menteri tenaga kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang upah minimum. Saat ini UMR juga sering disebut dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang lingkungannya mencakup provinsi. Selain dikenal dengan sebutan UMP, dikenal juga sebagai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003) menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

2.1.6.1 Tujuan Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (2013) upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum terdiri atas:

1. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
3. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.
4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana kebutuhan dasar, misalnya, makanan, pakaian, penginapan, pelatihan dan kesejahteraan tidak dapat dipenuhi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan pokok atau kesulitan untuk pergi ke sekolah dan bekerja. Cara untuk menghitung persentase kemiskinan yaitu jumlah penduduk miskin dibagi jumlah total penduduk (Alhudhori, 2017).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah rangkaian tujuan global yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB, dengan tujuan utama untuk mengatasi berbagai tantangan dunia, termasuk kemiskinan. Salah satu target paling penting dalam SDGs adalah mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuk dan

dimensi. Tujuan pertama dari SDGs adalah untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem bagi semua orang di seluruh dunia, yang ditentukan sebagai mereka yang hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari. Target ini bertujuan untuk mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensi menurut definisi nasional pada tahun 2030. Strategi pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dengan menerapkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan tepat bagi semua individu, terutama bagi mereka yang paling rentan (Danilia & Setianingsih, 2011).

Dari sudut pandang ekonomi, ada tiga faktor kemiskinan. Pertama-tama, pada tingkat mini, kebutuhan muncul dari tanggung jawab yang tidak konsisten, yang mendorong sirkulasi pembayaran yang tidak konsisten. Orang miskin hanya mampu mendapatkan sumber daya yang terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, kemelaratan muncul dari kontras dalam sifat SDM. Kualitas SDM yang buruk juga akan menyebabkan rendahnya efisiensi yang berdampak pada rendahnya upah. Penyebab kualitas SDM yang buruk adalah karena instruksi yang rendah, keterbelakangan wilayah tujuan, segregasi atau keturunan. Ketiga, kemelaratan tumbuh dari perbedaan dalam penerimaan aset (Kuncoro, 2004).

Dari ketiga faktor kemiskinan tersebut yang dijelaskan sebelumnya, bermula dari teori lingkaran setan kemiskinan "*The Vicious Circle of Poverty*" adanya paradigma siklus kemiskinan menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kemiskinan itu sendiri. Teori dikatakan oleh Nurkse (1953) bahwa negeri miskin adalah miskin karena miskin (*a poor country is poor because it is poor*), dan efek tidak memilikinya adalah negara mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang

terjadi di suatu negeri tidak memiliki ujung pangkal, dengan kata lain negara yang masuk dalam kategori miskin itu disebabkan karena negara tersebut tidak memiliki apa-apa dan dari ketidakpunyaannya itu yang menyebabkan negara mengalami kemiskinan.

2.1.1.1 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan memiliki makna yang luas & susah diukur. Namun, dua jenis perkiraan kemiskinan yang biasa digunakan, yakni kebutuhan langsung yang spesifik dan kemiskinan relatif, yaitu (Mustika, 2018):

a) Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, gagasan kemiskinan mengacu pada penilaian tingkat dan kebutuhan upah. keperluan berharga terbatas pada keperluan dasar/ keperluan esensial kecil yang memungkinkan kehidupan yang baik. Mengingat kebutuhan yang paling mendasar, misalnya, makanan, pakaian, kesejahteraan, penginapan dan pendidikan yang penting.

b) Kemiskinan Relatif

Memiliki penghasilan yang bisa dikatakan mencukupi kebutuhan pokok yang minim tidak serta merta berarti anda tidak miskin. Ada ahli berpendapat bahwa walaupun kompensasi telah sampai pada tingkat kebutuhan yang paling mendasar, namun masih jauh lebih rendah dari kondisi daerah sekitarnya. Hal ini terjadi dengan alasan bahwa kemiskinan masih mengudara oleh keadaan ekologis daripada iklim individu yang bersangkutan.

2.1.1.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan bermuara pada lingkaran setan teori kemiskinan. Kegagalan pasar, keterbelakangan, & sedikitnya dana menyebabkan efisiensi yang rendah. Efisiensi rendah mendorong upah rendah. Gaji rendah akan mempengaruhi dana cadangan dan spekulasi rendah, usaha rendah akan mendorong keterbelakangan, dll. Nurkse membayangkan negara yang malang itu miskin karena miskin (*a poor country is poor because it is poor*) (Nurkse, 1953).

Apabila dipandang dari sisi ekonomi, Kuncoro dalam Danilia & Setianingsih (2011) menyatakan penyebab kemiskinan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu:

1. Pada tingkat makro, kemiskinan berasal dari kepemilikan sumber daya yang tidak merata dan menyebabkan pembagian penghasilan yang tidak merata, dengan orang miskin memiliki aset yang terbatas & berkualitas rendah.
2. Kebutuhan muncul dari kontras dalam sifat SDM, karena pekerjaan pribadi berkualitas rendah berarti efisiensi rendah dan upah rendah.
3. Kebutuhan muncul dari penyimpangan dalam akses dan permodalan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang telah dirangkum peneliti terkait persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(Arba et al., 2021) Aplikasi Model Persamaan Simultan Data Panel Dinamis Untuk Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah	Variabel dependen ▪ IPM Variabel Independen Metode penelitian ▪ Two- Stage Least Squares (TSLS)	Variabel dependen ▪ PDRB Variabel Independen ▪ Pengeluaran Pemerintah Daerah (PD) ▪ Angkatan Kerja (AK) ▪ Lama Bersekolah (LB) ▪ Angka Harapan Hidup (AHH)	▪ PDRB Lama Sekolah berpengaruh positif terhadap IPM ▪ IPM berpengaruh Positif terhadap pertumbuhan ekonomi ▪ Pengeluaran Pemerintah Daerah (PD) berpengaruh Negatif terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Universitas Jenderal Soedirman https://jurnal.unupurwokerto.ac.id/index.php/fusioma/article/view/26
2.	(Simarmata & Iskandar, 2022) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm: Analisa Two Stage Least Square Untuk Kasus Indonesia	Variabel dependen ▪ IPM Variabel Independen ▪ Metode penelitian ▪ Two-Stage Least Squares (TSLS)	Variabel dependen ▪ Pertumbuhan ekonomi Variabel Independen ▪ Pengeluaran Pemerintah ▪ Investasi ▪ Jumlah Penduduk ▪ Kemiskinan Metode Penelitian ▪	▪ Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. ▪ Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.	Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/33417

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	(Siregar et al., 2023)	Variabel dependen	Variabel dependen	▪ Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	Jurnal Transformasi Humaniora https://www.bing.com/search?q=Analisis+Dampak+Inflasi+Terhadap+Angka+Kemiskinan+Di+Indonesia
	Analisis Dampak Inflasi Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia	▪ Kemiskinan	▪	▪ Pertumbuhan Ekonomi	
	Variabel Independen	Variabel Independen	Metode Penelitian	▪ Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	
	Metode Penelitian		▪ regresi linier berganda		
4.	(Pramestry & Marseto, 2022)	Variabel dependen	Variabel dependen	▪ Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar http://jurnal.utu.ac.id/ekonomi/article/view/5324
	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jombang	▪ IPM	▪	▪ Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan	
	Variabel Independen	Variabel Independen	Metode Penelitian	▪ PDRB merupakan satu-satunya variabel yang memengaruhi dengan positif serta signifikan terhadap IPM.	
	Metode Penelitian		Regresi linier berganda		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	(Pasaribu, 2024) Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sorong	Variabel Dependen ▪ Kemiskinan Variabel Independen ▪ Pengangguran Metode Penelitian ▪	Variabel Dependen Variabel Independen Metode Penelitian ▪ regresi linier berganda	▪ Pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis https://ojs.serambi.ac.id/serambi-ekonomi-dan-bisnis/article/view/7279/5207
6.	(Susanto & Pangesti, 2021) Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	Variabel dependen ▪ Kemiskinan Variabel Independen ▪ Inflasi	Variabel Dependen Variabel Independen ▪ PDB Metode Penelitian ▪ regresi linier berganda	▪ Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, ▪ Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	Journal of Applied Business and Economics (JABE) https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/7653
7.	(Juardi et al., 2023) Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel dependen ▪ Kemiskinan Variabel Independen ▪ PDRB ▪ Inflasi	Variabel Dependen Variabel Independen ▪ Jumlah Penduduk ▪ Tingkat Pendidikan Metode Penelitian	▪ Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan ▪ Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan	Bulletin of Economic Studies (BEST) https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/best/article/view/35588

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			▪ regresi linier berganda		
8.	(Amalia & Rachmawati, 2022) Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Surabaya	Variabel Dependen ▪ Kemiskinan Variabel Independen ▪ Inflasi ▪ PDRB ▪ Pengangguran	Variabel Dependen ▪ Variabel Independen ▪ Metode Penelitian ▪ regresi linier berganda	▪ Inflasi dan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan ▪ Pengangguran ternyata memiliki pengaruh secara positif terhadap Kemiskinan	Journal Of Economics https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/46004/38956
9.	(Amanda & Fathoni, 2023) Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Dependen ▪ Kemiskinan Variabel Independen ▪ Inflasi	Variabel Dependen ▪ Variabel Independen ▪ Dana ZIS Variabel Intervening ▪ PDB Metode Penelitian ▪ regresi linear berganda dan analisis jalur	▪ Dana ZIS memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. ▪ Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Jurnal Islamic Economics and Business Review https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/6278
10.	(Arba et al., 2021) Aplikasi Model Persamaan Simultan Data Panel Dinamis Untuk Pemodelan Pertumbuhan	Variabel dependen ▪ IPM Variabel Independen ▪	Variabel dependen ▪ PDRB Variabel Independen Metode Penelitian	▪ IPM dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap	Jurnal FUSIOMA (Fundamental Scientific Journal of Mathematics)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah		▪ Pengeluaran Pemerintah Daerah ▪ Angkatan Kerja (AK) ▪ Lama Bersekolah (LB) ▪ Angka Harapan Hidup (AHH) Metode Penelitian ▪ panel dinamis, metode GMM-AB	variabel pertumbuhan ekonomi variabel pertumbuhan ekonomi dan lama bersekolah berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM	Universitas Jenderal Soedirman https://jurnal.unupurwokerto.ac.id/index.php/fusioma/article/view/26
11.	(Mustika, 2018) Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008	Variabel dependen ▪ Kemiskinan Variabel Independen ▪	Variabel Dependen ▪ Variabel Independen ▪ PDB ▪ Jumlah Penduduk Metode Penelitian ▪ regresi linear berganda	▪ Variabel PDB dan Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Jurnal Paradigma Ekonomika https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/57
12.	(Shina, 2016) Penerapan 2 SLS GMM-AB pada Persamaan Simultan Data Panel Dinamis untuk Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Variabel Dependen ▪ Kemiskinan Variabel Independen ▪ UMR	Variabel Dependen ▪ Pengangguran ▪ PDRB Variabel Independen ▪ Nilai Ekspor	▪ Pertumbuhan ekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan ekspor, belanja	Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/a

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Metode Penelitian		kemiskinan dan jumlah penduduk.	et/publication /347615033_Estimasi_Model_Persamaan_Simultan_Dengan_Metode_Two_Stage_Least_Square (2SLS)
		▪ Persamaan Simultan Dengan Metode Two Stage Least Square (2SLS)			
15. (Alhudhori, 2017)	Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi	Variabel Dependen ▪ Penduduk Miskin Variabel Independen ▪ IPM ▪ PDRB ▪ Jumlah Pengangguran	Variabel Dependen ▪ Variabel Independen	▪ IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin ▪ PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin ▪ Pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin	EKONOMIS: Journal of Economics and Business https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/12

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Kemiskinan

Hubungan antara TPT dengan kemiskinan berpengaruh positif, karena ketika TPT tinggi maka banyak individu yang tidak memiliki pekerjaan atau hanya memiliki pekerjaan tidak layak. Hal ini menyebabkan pendapatan rumah tangga berkurang sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Akibatnya, risiko jatuh ke dalam kategori miskin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Alhudhori (2017) yang menyatakan

bahwa TPT berdampak positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Penelitian serupa dilakukan oleh Amalia & Rachmawati (2022) yang menyatakan bahwa TPT berdampak positif terhadap kemiskinan di Kota Surabaya. Penelitian serupa dilakukan oleh Parulian & Hukom (2023) yang menyatakan bahwa TPT berdampak positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah. Penelitian serupa dilakukan oleh Pasaribu (2024) yang menyatakan bahwa TPT berdampak positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Sorong. Penelitian serupa dilakukan oleh Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) yang menyatakan bahwa TPT berdampak positif terhadap kemiskinan di di Indonesia. Khususnya semakin tinggi skor TPT cenderung menaikkan jumlah kemiskinan.

2.2.2 Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan

Hubungan antara inflasi dengan kemiskinan berpengaruh positif, karena ketika inflasi harga barang kebutuhan pokok meningkat, ukuran garis kemiskinan pun ikut naik. Jika pendapatan masyarakat tidak meningkat sebanding dengan kenaikan harga, maka jumlah penduduk yang jatuh di bawah garis kemiskinan akan bertambah. Hal ini sejalan dengan penelitian Halim et al (2022) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Penelitian serupa dilakukan oleh Nadeak (2023) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak positif terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian serupa dilakukan oleh Nasution et al (2023) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak positif terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian serupa dilakukan oleh Susanto & Pangesti (2021) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian serupa dilakukan oleh Wicaksono & Hutajulu

(2023) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak positif terhadap kemiskinan. Khususnya semakin tinggi inflasi cenderung menaikkan jumlah kemiskinan.

Namun hubungan antara inflasi terhadap kemiskinan juga bisa berpengaruh negatif, karena adanya intervensi pemerintah, pemerintah mungkin telah menerapkan kebijakan yang efektif, seperti subsidi kebutuhan pokok, program bantuan sosial, atau kontrol harga, sehingga dampak inflasi terhadap kemiskinan dapat ditekan. Penduduk miskin tidak akan terpengaruh pada tingkat inflasi karena pada dasarnya penduduk miskin tidak mempunyai daya beli, sehingga walaupun terjadi inflasi mereka tetap tidak punya daya beli. Hal ini sejalan dengan penelitian Batubara et al (2023) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian serupa dilakukan oleh Dewi & Husein (2023) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap kemiskinan di Aceh Barat. Penelitian serupa dilakukan oleh Gifelem et al (2023) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap kemiskinan di Kota Sorong. Penelitian serupa dilakukan oleh Lestari et al (2018) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Penelitian serupa dilakukan oleh Siregar et al (2023) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Khususnya semakin tinggi inflasi cenderung menurunkan presentase kemiskinan.

2.2.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan

Hubungan antara IPM dengan kemiskinan berpengaruh negatif, karena ketika IPM naik maka angka melek huruf, perbaikan perawatan kesehatan, pendidikan & penerimaan per kapita meningkatkan perkembangan manusia,

sehingga semakin tinggi kualitas penduduk di tempat tertentu, semakin sedikit individu miskin di sekitar sana. Hal ini sejalan dengan penelitian Arofah & Sishadiyati (2022) yang menyatakan bahwa IPM berdampak negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Jember. Penelitian serupa dilakukan oleh Fadila & Marwan (2020) yang menyatakan bahwa IPM berdampak negatif terhadap kemiskinan di Sumatra Barat. Penelitian serupa dilakukan oleh Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) yang menyatakan bahwa IPM berdampak negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian serupa dilakukan oleh Sulistianingsih & Misno (2019) yang menyatakan bahwa IPM berdampak negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota dipulau Kalimantan. Khususnya semakin tinggi skor IPM cenderung menurunkan jumlah kemiskinan.

2.2.4 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hubungan antara PDRB dengan IPM berpengaruh positif, karena ketika PDRB naik maka pendapatan masyarakat akan meningkat. Investasi untuk pembangunan infrastruktur sosial cenderung memiliki anggaran yang lebih besar, seperti sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan gratis, pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan program-program kesejahteraan sosial juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Arba et al (2021) yang menyatakan bahwa PDRB berdampak positif terhadap IPM di Jawa Tengah. Penelitian serupa dilakukan oleh Caesaktiti et al (2021) yang menyatakan bahwa PDRB berdampak positif terhadap IPM di Jawa Tengah. Penelitian serupa dilakukan oleh Kiha et al (2021) yang menyatakan bahwa

PDRB berdampak positif terhadap IPM di Provinsi NTB. Penelitian serupa dilakukan oleh Pramestry & Marseto (2022) yang menyatakan bahwa PDRB berdampak positif terhadap IPM di Kabupaten Jombang. Penelitian serupa dilakukan oleh Sania et al (2021) yang menyatakan bahwa PDRB berdampak positif terhadap IPM di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Khususnya semakin tinggi PDRB cenderung menaikkan skor IPM.

2.2.5 Hubungan Upah Minimum Regional (UMR) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hubungan antara UMR dengan IPM berpengaruh positif, karena ketika UMR naik maka pekerja memiliki daya beli yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, akses ke layanan kesehatan, dan obat-obatan. Dan memungkinkan keluarga memiliki lebih banyak dana untuk pendidikan anak-anak, baik untuk biaya sekolah, buku, hingga teknologi pendukung pembelajaran. Kemudian mendukung peningkatan kualitas perumahan, akses terhadap air bersih, dan listrik. Hal ini sejalan dengan penelitian Kiha et al (2021) yang menyatakan bahwa UMR berdampak positif terhadap IPM di Provinsi NTT. Penelitian serupa dilakukan oleh Nailufar et al (2024) yang menyatakan bahwa UMR berdampak positif terhadap IPM di Indonesia. Penelitian serupa dilakukan oleh Sania et al (2021) yang menyatakan bahwa UMR berdampak positif terhadap IPM di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian serupa dilakukan oleh Wiryawan et al (2024) yang menyatakan bahwa UMR berdampak positif terhadap IPM di Provinsi-Provinsi Indonesia. Penelitian serupa dilakukan oleh Rahyu et al (2022) yang menyatakan bahwa UMR berdampak positif terhadap IPM di

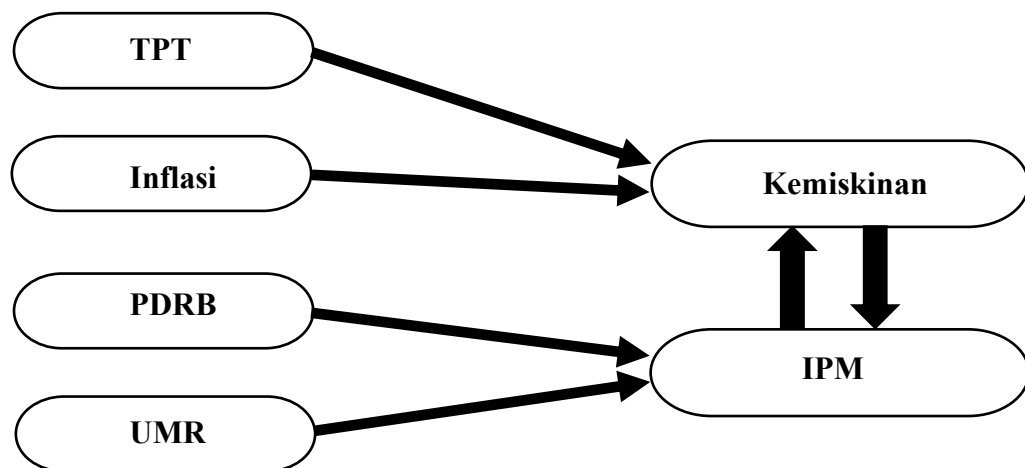
Kabupaten Karawang. Khususnya semakin tinggi UMR cenderung menaikkan skor IPM.

2.2.6 Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hubungan antara kemiskinan terhadap IPM berpengaruh negatif, karena ketika kemiskinan naik maka masyarakat miskin cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas, membatasi akses terhadap layanan kesehatan, nutrisi yang baik, dan sanitasi. Kemudian tingkat kesejahteraan dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sangat sulit. Hal ini sejalan dengan penelitian Amelinda & Rachmawati (2022) yang menyatakan bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap IPM di Kabupaten Tulungagung. Penelitian serupa dilakukan oleh Bahriyah & Primandhana (2021) yang menyatakan bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap IPM di Kabupaten Gresik. Penelitian serupa dilakukan oleh Jasasila (2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap IPM di Kabupaten Batang Hari. Penelitian serupa dilakukan oleh Rohma et al (2024) yang menyatakan bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap IPM di provinsi Sumatera Selatan. Penelitian serupa dilakukan oleh Simarmata & Iskandar (2022) yang menyatakan bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap IPM di Indonesia. Khususnya semakin tinggi kemiskinan cenderung menurunkan skor IPM.

Kemiskinan dapat berpengaruh terhadap IPM, demikian pula sebaliknya. Kedua interaksi tersebut bisa dijelaskan dalam teori lingkaran setan kemiskinan "*The Vicious Circle of Poverty*" yang menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kemiskinan itu sendiri. Setelah melakukan studi terdahulu terkait hubungan

antar variabel yang akan diteliti, diketahui bahwa TPT dan inflasi serta IPM memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Demikian pula, PDRB dan UMR serta kemiskinan berpengaruh terhadap IPM. Dengan demikian, diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, penulis memutuskan untuk membuat beberapa hipotesis/dugaan sementara dari penelitian ini, yaitu:

1. Diduga secara parsial variabel TPT dan inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
2. Diduga secara bersama-sama variabel TPT, inflasi, dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan.
3. Diduga secara parsial variabel PDRB dan UMR berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM.
4. Diduga secara bersama-sama variabel PDRB, UMR, dan kemiskinan berpengaruh terhadap IPM.